

Manajemen Wilayah Perbatasan Negara: *A Systematic Literature Review* tentang Tata Kelola, Keamanan, dan Pembangunan Berkelanjutan

Arifay Saini¹, Maria Christina Iman Kalis², M. Irfani Hendri³
^{1,2,3} Universitas Tanjungpura

Histori Naskah

Diserahkan:
18-06-2026

Direvisi:
27-07-2026

Diterima:
31-07-2026

Keywords

ABSTRACT

Modern sovereign borderlands are undergoing a fundamental paradigm shift from a traditional, militaristic security approach to an inclusive prosperity approach. This study aims to systematically synthesize the global academic discourse on border management across three primary dimensions: border governance, contemporary border security, and sustainable borderland development. Employing a Systematic Literature Review (SLR) research design strictly guided by the PRISMA 2020 protocol, a corpus of 50 final inclusion articles was extracted from Scopus, Web of Science, and Sinta databases published over the last decade (2016–2026). The findings reveal a sharp geographical polarization in research focus; Global North literature is heavily dominated by security governance, immigration enforcement, and smart borders, whereas Global South literature (including the specific context of Indonesia's Kalimantan borderlands) concentrates on spatial development, connectivity infrastructure, and cross-border trade. Furthermore, the review identifies a strong theoretical fragmentation among previous studies, which tend to examine these three pillars in isolation. As its core novelty, this study successfully constructs "The Integrative Framework," merging multi-level governance, asymmetric security mitigation, and socio-ecological resilience into a unified and holistic conceptual umbrella. The practical implications of this research offer strategic navigation for public policymakers and the National Border Management Agency to formulate adaptive, secure, and welfare-oriented action plans at the nation's frontiers.

: *Border Management; Border Governance; Contemporary Security; Sustainable Development; Systematic Literature Review*

ABSTRAK

Wilayah perbatasan negara di era kontemporer menghadapi transformasi paradigma dari pendekatan keamanan (security approach) yang militeristik menuju pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis diskursus akademik global mengenai manajemen perbatasan melalui tiga pilar dimensi utama: tata kelola, keamanan kontemporer, dan pembangunan berkelanjutan. Menggunakan desain riset Systematic Literature Review (SLR) yang dipandu secara ketat oleh protokol PRISMA 2020, korpus data sebanyak 50 artikel inklusi final diekstraksi dari basis data Scopus, Web of Science, dan Sinta dalam rentang temporal sepuluh tahun terakhir (2016–2026). Hasil penelitian menyingkap adanya polarisasi lokus geografis yang tegas; literatur Global North didominasi secara absolut oleh isu tata kelola keamanan, pengetatan imigrasi, dan smart borders, sedangkan literatur Global South (termasuk konteks spesifik Indonesia di wilayah Kalimantan) lebih terkonsentrasi pada pembangunan spasial, infrastruktur konektivitas, dan perdagangan lintas batas (cross-border trade). Tinjauan sistematis ini juga mengungkap adanya fragmentasi teoretis yang kuat pada studi terdahulu yang cenderung menganalisis ketiga pilar tersebut secara terisolasi. Sebagai puncak temuan (novelty), penelitian ini berhasil mengonstruksi sebuah Kerangka Integratif (The Integrative Framework) yang merajut tata kelola multi-aktor, mitigasi keamanan asimetris, dan keadilan ketahanan sosial-ekologis ke dalam satu payung konseptual yang holistik. Implikasi praktis dari riset ini memberikan navigasi strategis bagi para pembuat kebijakan publik dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam merumuskan rencana aksi kinerja yang adaptif, aman, dan menyejahterakan di wilayah beranda terdepan negara.

Kata Kunci : Manajemen Wilayah Perbatasan; Tata Kelola; Keamanan Kontemporer; Pembangunan Berkelanjutan; Systematic Literature Review

Corresponding Author : Arifay Saini, Universitas Tanjungpura, e-mail: b3081251022@student.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan negara pada era kedaulatan tradisional secara historis dikonseptualisasikan secara sempit sebagai garis demarkasi fisik yang rigid, di mana fungsi utamanya berfokus secara eksklusif pada perlindungan integritas teritorial dari ancaman eksternal (Brunet-Jailly, 2022). Dalam paradigma klasik ini, tata kelola perbatasan sangat bertumpu pada pendekatan keamanan (*security approach*) yang bersifat militeristik, sentralistik, dan kerap kali mengisolasi wilayah batas dari pusaran dinamika ekonomi regional (Newman, 2021). Namun, seiring dengan masifnya arus globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan interkonektivitas antarnegara di abad ke-21, batasan geopolitik tersebut menghadapi transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perbatasan kini tidak lagi sekadar menjadi "tembok pemisah" kedaulatan, melainkan telah berevolusi menjadi ruang interaksi transnasional yang sangat dinamis dan kompleks (Laine, 2020).

Merespons perubahan tatanan global tersebut, kebijakan strategis di banyak negara mulai mengadopsi pergeseran paradigma menuju pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Melalui pendekatan ini, kawasan perbatasan direkonstruksi posisinya dari sekadar wilayah pinggiran (*periphery*) yang identik dengan keterbelakangan infrastruktur, menjadi beranda terdepan atau etalase ekonomi sebuah negara (Jones, 2021). Arah pembangunan mulai difokuskan pada penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, fasilitasi pergerakan lalu lintas barang dan jasa lintas batas (*cross-border trade*), serta penyediaan infrastruktur konektivitas untuk meminimalisasi ketimpangan spasial antara kawasan pusat dan daerah terluar (Simmons & Dijk, 2022).

Kendati demikian, transisi menuju perbatasan yang lebih inklusif dan terbuka (*soft borders*) ini memunculkan sebuah paradoks manajerial baru. Di satu sisi, pelonggaran batas administrasi memfasilitasi integrasi ekonomi yang esensial bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun di sisi lain, hal ini menciptakan kerentanan strategis terhadap eskalasi ancaman keamanan non-tradisional, seperti penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia (*human trafficking*), aktivitas terorisme lintas negara, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, hingga kerentanan terhadap penyebaran wabah penyakit global (Andreas, 2021). Tingginya asimetri kebijakan dan ketimpangan ekonomi antara dua negara yang saling berbatasan sering kali dimanfaatkan oleh aktor-aktor kejahatan transnasional yang berlindung di balik aktivitas perlintasan batas yang sah.

Kompleksitas yang saling berbenturan ini mengindikasikan bahwa tata kelola perbatasan di era kontemporer tidak dapat lagi direduksi menjadi kebijakan yang bersifat monolitik (Kramsch, 2023). Pendekatan yang mempertentangkan antara ketatnya keamanan militeristik dan longgarnya integrasi ekonomi terbukti tidak lagi relevan. Negara dituntut untuk melakukan reorientasi strategis melalui sebuah manajemen perbatasan yang holistik, di mana kapasitas tata kelola pemerintahan yang responsif (*governance*), ketangguhan dalam memitigasi risiko keamanan (*security*), serta implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis dan ekonomi (*sustainable development*) saling disinergikan secara proporsional demi menjamin ketahanan wilayah secara jangka panjang (Smith & Harrison, 2023).

A. Definisi Konseptual

Untuk menghindari ambiguitas analitis dan memberikan batasan operasional yang terukur dalam tinjauan literatur ini, manajemen wilayah perbatasan dikonseptualisasikan melalui tiga pilar dimensi utama, yaitu tata kelola, keamanan kontemporer, dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga pilar ini tidak berdiri sebagai variabel yang terisolasi, melainkan diposisikan sebagai entitas konseptual yang saling beririsan.

Pertama, Tata Kelola Perbatasan (*Border Governance*) didefinisikan sebagai arsitektur institusional dan mekanisme regulasi yang digunakan oleh suatu negara untuk mengelola yurisdiksi spasial serta arus mobilitas (manusia, barang, dan modal) di wilayah terluarnya (Scott, 2020). Secara konseptual, literatur mutakhir tidak lagi mereduksi tata kelola perbatasan semata-mata pada kontrol sentralistik dari pemerintah pusat. Konsep ini kini mencakup orkestrasi multi-aktor pada berbagai tingkatan (*multi-level governance*), yang melibatkan desentralisasi kewenangan kepada pemerintah

daerah, partisipasi masyarakat sipil, hingga perumusan kerangka kerja sama lintas batas (*cross-border cooperation*) secara bilateral maupun multilateral dengan negara tetangga (Brunet-Jailly, 2022; Kurowska-Pysz, 2021).

Kedua, Keamanan Perbatasan Kontemporer (*Contemporary Border Security*) merujuk pada spektrum ancaman multidimensional yang melampaui konsepsi keamanan tradisional. Jika pendekatan klasik mendefinisikan keamanan secara kaku sebagai upaya perlindungan kedaulatan teritorial dari invasi militer asing (*state-centric security*), literatur kontemporer memperluas definisi ini untuk mengakomodasi ancaman non-tradisional (*human security*) (Côté-Boucher, 2020). Konsep ini mencakup kapasitas negara dalam memitigasi kerentanan transnasional yang bersifat asimetris, termasuk namun tidak terbatas pada kejahatan terorganisasi lintas batas, penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia, serta ancaman krisis biosekuriti dan pandemi yang memanfaatkan poros perlintasan batas (Andreas, 2021).

Ketiga, Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Perbatasan (*Sustainable Borderland Development*) dikonseptualisasikan sebagai proses transformasi spasial dan ekonomi yang berupaya mengintegrasikan wilayah pinggiran ke dalam rantai nilai perekonomian nasional tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan lokal (Kramsch, 2023). Dalam konteks perbatasan, konsep ini dioperasionalkan melalui penciptaan ekuilibrium antara tiga elemen: (1) penyediaan infrastruktur konektivitas dan kawasan permukiman yang inklusif untuk mereduksi ketimpangan pembangunan; (2) pelestarian ekosistem ekologis lintas batas, mengingat batas alamiah perbatasan sering kali berupa hutan konservasi atau daerah aliran sungai; dan (3) pemberdayaan modal sosial serta ekonomi masyarakat subsisten di beranda negara (Smith & Harrison, 2023).

Melalui penjabaran definisi operasional tersebut, tinjauan literatur ini akan menelusuri bagaimana diskursus akademik global mendokumentasikan interaksi tarik-ulur maupun sinergi di antara kepastian tata kelola, ketahanan keamanan, dan keadilan pembangunan berkelanjutan.

B. Urgensi SLR

Literatur akademik mengenai manajemen wilayah perbatasan tumbuh pesat dalam satu dekade terakhir, namun kajian tinjauan yang tersedia masih menunjukkan fragmentasi teoretis yang kuat. Sebagian besar studi terdahulu mensintesis isu perbatasan secara kompartemental — misalnya hanya memetakan tata kelola otonomi (Popescu, 2021), murni meninjau sekuritisasi (Laine, 2020), atau berfokus pada infrastruktur fisik tanpa mempertimbangkan mitigasi ancaman transnasional (Scott, 2020). Pemisahan ini menyisakan celah penelitian yang krusial, sebab tata kelola, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan pada praksisnya saling berkelindan; pembangunan infrastruktur konektivitas yang masif, misalnya, dapat menjadi bumerang bagi keamanan nasional apabila tidak diiringi tata kelola institusional yang solid (Kramsch, 2023).

Di sinilah urgensi SLR ini: hingga kini belum tersedia tinjauan sistematis komprehensif yang merajut ketiga pilar tersebut ke dalam satu payung analisis integratif berbasis literatur bereputasi global. Hasil sintesisnya diproyeksikan menjadi landasan empiris sekaligus navigasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam merancang tata ruang, regulasi, dan rencana aksi pembangunan perbatasan yang tangguh, aman, dan berwawasan lingkungan (Smith & Harrison, 2023).

C. Pertanyaan Penelitian

Berpijak pada identifikasi kesenjangan literatur (*research gap*) dan urgensi pengintegrasian pendekatan multidimensi yang telah diuraikan sebelumnya, tinjauan literatur sistematis ini dirancang untuk membedah secara mendalam diskursus manajemen wilayah perbatasan (Newman, 2021). Untuk memastikan agar penelusuran, ekstraksi, dan sintesis data literatur tetap terstruktur serta tepat sasaran, penelitian ini dikendalikan oleh empat pertanyaan penelitian (*Research Questions/RQ*) utama. Tiga pertanyaan pertama ditujukan untuk mengevaluasi masing-masing pilar secara spesifik, sedangkan pertanyaan keempat secara khusus dirumuskan untuk mengekstraksi benang merah dan membangun sintesis dari ketiganya (Kramsch, 2023). Adapun rumusan pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. RQ1 (Fokus Tata Kelola): Bagaimana tren dan model tata kelola (*governance*) wilayah perbatasan dikonseptualisasikan dalam literatur global selama satu dekade terakhir?

2. RQ2 (Fokus Keamanan): Apa saja pergeseran paradigma ancaman dan dimensi keamanan (tradisional vs. non-tradisional) yang paling mendominasi diskursus manajemen perbatasan kontemporer?
3. RQ3 (Fokus Pembangunan): Bagaimana strategi dan indikator pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diimplementasikan serta dievaluasi efektivitasnya di kawasan perbatasan?
4. RQ4 (Fokus Integrasi/Sintesis): Bagaimana ketiga dimensi tersebut (tata kelola, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan) saling beririsan secara teoretis maupun praksis dalam membentuk kerangka manajemen wilayah perbatasan yang holistik?

D. Tujuan Penelitian

Secara ekuivalen dan selaras dengan rumusan pertanyaan penelitian di atas, *Systematic Literature Review* (SLR) ini dikembangkan dengan tujuan untuk menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif terkait manajemen kawasan perbatasan. Secara spesifik, penelitian ini menetapkan empat tujuan utama sebagai berikut:

1. RO1 (Membedah Tata Kelola): Mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan evolusi model tata kelola (*border governance*) yang paling responsif dan adaptif, berdasarkan evaluasi terhadap kajian literatur bereputasi global selama sepuluh tahun terakhir (Brunet-Jailly, 2022).
2. RO2 (Memetakan Keamanan): Mengeksplorasi berbagai dimensi keamanan kontemporer guna mendeskripsikan secara utuh kompleksitas pergeseran ancaman dari konvensional menuju non-tradisional di wilayah perbatasan pada era modern (Andreas, 2021).
3. RO3 (Mengevaluasi Pembangunan): Mengkaji secara sistematis berbagai pendekatan, indikator keberhasilan, dan strategi pembangunan berkelanjutan yang telah diimplementasikan dalam mentransformasi kawasan terluar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan (Smith & Harrison, 2023).
4. RO4 (Membangun Kerangka Integratif): Mensintesis temuan dari ketiga pilar variabel tersebut guna mengkonstruksi sebuah Kerangka Konseptual Integratif (*Integrative Framework*). Kerangka baru ini ditujukan untuk mengisi kekosongan literatur dan dirancang sebagai landasan empiris bagi formulasi kebijakan publik yang lebih komprehensif, serta menjadi panduan arah bagi penelitian akademis di masa mendatang (Kramsch, 2023).

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi desain *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis korpus literatur global mengenai persimpangan tata kelola, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan. Seluruh prosedur penelusuran dan ekstraksi data dipandu oleh protokol PRISMA 2020 (Page et al., 2021) guna menjamin transparansi dan reproduksibilitas. Secara operasional, tahapan metodologi ini dibagi ke dalam lima fase: penetapan protokol, strategi pencarian sumber data, penentuan kriteria inklusi-eksklusi, eksekusi seleksi studi, serta ekstraksi dan analisis data tematik.

A. Protokol dan Panduan Tinjauan

Penyusunan tinjauan literatur sistematis ini secara ketat didasarkan pada kerangka kerja operasional PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Protokol PRISMA dipilih karena menyediakan panduan penulisan ilmiah yang komprehensif, teruji, dan diakui secara internasional untuk memastikan objektivitas serta validitas hasil sintesis literatur (Page et al., 2021). Penerapan protokol ini berfungsi sebagai instrumen penjaminan mutu (*quality assurance*) di setiap tahapan pengerjaan SLR, mulai dari perencanaan awal, penelusuran, hingga pelaporan akhir naskah publikasi.

Dalam pelaksanaannya, panduan tinjauan ini dioperasionalkan melalui empat fase krusial PRISMA. Pertama, fase identifikasi (*identification*) yang berfokus pada pelacakan menyeluruh terhadap artikel potensial pada basis data ilmiah. Kedua, fase penyaringan (*screening*) di mana artikel disaring secara mekanis berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, dan kriteria batasan awal. Ketiga, fase kelayakan (*eligibility*) yang melibatkan penelaahan teks penuh (*full-text review*) secara

mendalam untuk menilai relevansi substansi artikel terhadap pertanyaan penelitian (RQ1 hingga RQ4). Keempat, fase inklusi (*included*) yang menetapkan kumpulan artikel final yang memenuhi seluruh standar kualitatif untuk sintesis (Moher et al., 2015). Seluruh keputusan metodologis yang diambil dalam setiap fase didokumentasikan secara eksplisit dan transparan guna meminimalkan risiko bias publikasi serta memastikan akuntabilitas penuh dari proses peninjauan (Snyder, 2019).

B. Sumber Data dan Strategi Pencarian

Penelusuran literatur dalam SLR ini bertumpu pada penggunaan basis data ilmiah internasional bereputasi tinggi yang memiliki indeksasi ketat, yaitu Scopus dan Web of Science (WoS). Pemilihan kedua basis data utama ini didasarkan pada rekam jejak keduanya sebagai penyedia artikel ilmiah berkualitas tinggi dengan sistem *peer-review* yang komprehensif, sehingga mampu menjamin bahwa artikel yang diekstraksi memenuhi kualifikasi klaster Q1 dan Q2 (Gusenbauer & Haddaway, 2020). Guna memperluas cakupan literatur lokal yang kontekstual dan relevan dengan dinamika perbatasan di Indonesia, penelusuran sekunder juga dilakukan secara terbatas melalui repositori Sinta (*Science and Technology Index*) pada klaster jurnal Sinta 1 dan Sinta 2.

Strategi pencarian dirancang secara sistematis dengan menyusun *Search String* yang mengombinasikan kata kunci utama menggunakan operator Boolean (AND, OR). Kata kunci diturunkan secara langsung dari tiga pilar variabel penelitian — tata kelola, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan — yang disesuaikan dengan cakupan pencarian pada aspek judul (*title*), abstrak (*abstract*), dan kata kunci (*keywords*) artikel (Booth et al., 2021). Adapun formulasi sintaksis pencarian (*search string*) yang dieksekusi pada basis data adalah sebagai berikut:

TITLE-ABS-KEY (("border management" OR "border governance" OR "borderland") AND ("governance" OR "policy" OR "institutional") AND ("security" OR "human security" OR "transnational crime") AND ("sustainable development" OR "infrastructure" OR "regional growth"))*

Proses penelusuran ini dibatasi pada artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2016–2026). Pembatasan temporal ini diterapkan secara sengaja untuk memastikan bahwa data literatur yang diperoleh mencerminkan perkembangan teoretis terkini serta menangkap dinamika perubahan paradigma manajemen perbatasan yang paling kontemporer di era modern (Snyder, 2019). Seluruh hasil pencarian mentah dari basis data kemudian diekspor ke dalam format berkas .RIS untuk dikelola lebih lanjut menggunakan perangkat lunak manajemen referensi Mendeley, guna mendeteksi dan mengeliminasi adanya duplikasi artikel sebelum memasuki fase penyaringan berikutnya.

Guna memberikan transparansi metodologis yang lebih tinggi bagi *reviewer* jurnal, Tabel 1 menyajikan dekonstruksi sintaksis pencarian (*search string mapping*), mengurai bagaimana setiap klaster kata kunci diturunkan secara logis dari pertanyaan penelitian (RQ) dan dikombinasikan menggunakan operator Boolean.

Tabel 1. Dekonstruksi Sintaksis dan Pemetaan Kata Kunci Pencarian

Dimensi / Konsep Utama	Kata Kunci Utama (Inggris)	Padanan / Sinonim (Indonesia)	Operator	Fungsi Operasional
Konteks Spasial & Batas Wilayah (Fokus Utama)	"border management", "border governance", "borderland*"	"wilayah perbatasan", "manajemen perbatasan", "kawasan perbatasan"	OR	Menjaring seluruh artikel yang lokus kajiannya berada di ruang perbatasan negara.
Pilar 1: Tata Kelola (RQ1)	"governance", "policy", "institutional", "multi-level governance"	"tata kelola", "kebijakan", "kelembagaan", "pemerintahan"	OR	Menyaring artikel yang membahas mekanisme regulasi, kelembagaan, dan tata pamong perbatasan.
Pilar 2: Keamanan (RQ2)	"security", "human security", "transnational crime", "border policing"	"keamanan", "keamanan manusia", "kejahatan"	OR	Membatasi pencarian pada artikel yang membedah dinamika ancaman

		transnasional", "sekuritisasi"		konvensional maupun non-tradisional.
Pilar 3: Pembangunan Berkelanjutan (RQ3)	"sustainable development", "infrastructure", "regional growth", "spatial planning"	"pembangunan berkelanjutan", "infrastruktur", "pertumbuhan regional", "tata ruang"	OR	Menyaring artikel yang mengevaluasi transformasi spasial, infrastruktur, ekologi, dan ekonomi lokal.
Hubungan Antar Klaster (RQ4 / Sintesis)	Penggabungan seluruh klaster dimensi di atas menjadi satu kesatuan sintaksis utuh.	—	AND	Memastikan artikel yang lolos seleksi awal wajib mengandung irisan dari seluruh dimensi yang diteliti.

C. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi merupakan langkah strategis yang krusial untuk membatasi ruang lingkup kajian serta menjamin bahwa hanya literatur yang valid, kredibel, dan relevan secara substansial yang akan dianalisis (Booth et al., 2021). Kriteria inklusi dalam SLR ini difokuskan pada artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses penelaahan sejawat (*peer-reviewed*) dengan fokus kajian pada tata kelola, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan darat maupun laut. Sebaliknya, kriteria eksklusi diterapkan untuk mengeliminasi dokumen yang tidak mengalami proses penelaahan sejawat yang ketat atau artikel yang menggunakan istilah "perbatasan" secara metaforis (misalnya perbatasan psikologis atau batasan organisasi bisnis). Batasan temporal ditetapkan selama sepuluh tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 hingga 2026, guna menangkap pergeseran paradigma kebijakan kontemporer yang paling mutakhir. Secara terperinci, parameter kriteria inklusi dan eksklusi yang diterapkan dalam penelitian ini dirangkum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Matriks Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Parameter Batasan	Kriteria Inklusi (Sertakan)	Kriteria Eksklusi (Gugurkan)
Rentang Waktu Publikasi	Artikel yang diterbitkan antara Januari 2016 hingga pertengahan tahun 2026.	Artikel yang diterbitkan sebelum tahun 2016.
Jenis Dokumen	Artikel riset orisinal (<i>original research article</i>) dari jurnal ilmiah terindeks.	Ringkasan konferensi, bab buku, tesis/disertasi, artikel opini, ulasan buku, dan laporan kebijakan.
Reputasi Publikasi	Jurnal internasional Scopus Q1/Q2 atau WoS, serta jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2.	Jurnal di luar indeksasi Scopus/WoS (atau Scopus Q3/Q4), serta jurnal nasional Sinta 3–6 atau belum terakreditasi.
Bahasa Dokumen	Artikel yang ditulis lengkap dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.	Artikel dalam bahasa selain Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
Fokus Substansi Kajian	Artikel yang membedah minimal dua dari tiga pilar utama secara empiris atau konseptual dengan lokus wilayah perbatasan negara.	Artikel yang hanya membahas sengketa kartografi murni, teknik demarkasi fisik tanpa dimensi sosial-politik, atau istilah perbatasan di luar konteks teritorial negara.

D. Proses Seleksi Studi Alur

Proses seleksi studi dalam penelitian ini dijalankan secara mekanis dan bertahap dengan mengadopsi alur diagram PRISMA 2020, guna menyaring seluruh artikel yang berhasil dijaring oleh *search* string di basis data Scopus, Web of Science, dan Sinta, sehingga diperoleh korpus data yang murni dan relevan tinggi tanpa adanya intervensi subjektivitas peneliti (Page et al., 2021). Secara operasional, tahapan seleksi ini dibagi ke dalam empat fase utama yang saling mengikat:

1. Fase 1: Identifikasi (*Identification*): Seluruh rekaman artikel ilmiah yang ditemukan melalui penelusuran otomatis di basis data diekstraksi ke dalam format dokumen yang seragam dan digabungkan ke dalam perangkat lunak manajemen referensi untuk pencarian artikel ganda (*duplicate removal*), yang muncul akibat indeksasi ganda antara Scopus dan Web of Science (Xiao & Watson, 2019).

2. Fase 2: Penyaringan (*Screening*): Artikel yang lolos pembersihan data duplikat disaring secara manual berdasarkan judul (*title*) dan abstrak (*abstract*) menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi tahap pertama (Booth et al., 2021).
3. Fase 3: Kelayakan (*Eligibility*): Naskah yang lolos penyaringan diunduh dalam bentuk teks penuh (*full-text*) untuk dibaca secara kritis, memastikan kesesuaian substansi metodologi dan temuan empirisnya terhadap RQ1–RQ4 (Snyder, 2019).
4. Fase 4: Inklusi dan *Snowballing*: Peneliti menerapkan teknik pencarian sekunder berupa *snowballing sampling* (*backward* dan *forward*) untuk memitigasi risiko terlewatnya artikel Q1/Q2 berkualitas tinggi oleh kata kunci pencarian utama (Wohlin, 2014).

E. Penilaian Kualitas

Setelah fase seleksi studi penuh diselesaikan, seluruh artikel yang dinyatakan lolos wajib melewati tahap penilaian kualitas (*quality assessment*) sebelum memasuki proses ekstraksi data, guna mengevaluasi rigiditas metodologis, keandalan temuan empiris, serta kontribusi teoretis dari masing-masing artikel yang terpilih (Jesson et al., 2011). Penilaian kualitas dioperasionalkan dengan mengadopsi dan memodifikasi instrumen evaluasi dari *Critical Appraisal Skills Programme* (CASP, 2018), dengan lima kriteria kelayakan mutu yang dinilai menggunakan skala tiga poin (0 = Tidak Memenuhi; 1 = Memenuhi Sebagian; 2 = Memenuhi Sepenuhnya), sehingga setiap artikel memiliki skor kumulatif antara 0 hingga 10 poin.

Tabel 3. Instrumen Penilaian Kualitas Artikel (Quality Assessment Checklist)

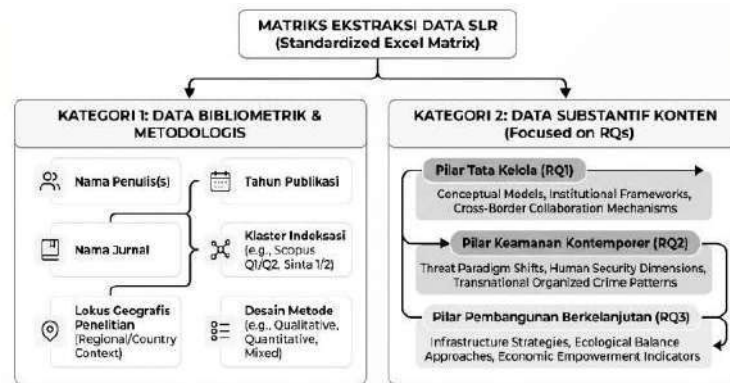
Kode	Parameter Mutu	Indikator Evaluasi	Bobot Skor
QA1	Kejelasan Tujuan Riset	Apakah artikel menjabarkan tujuan penelitian, latar belakang masalah, dan urgensi kajian wilayah perbatasan secara eksplisit?	0 = Tidak Jelas; 1 = Kurang Jelas; 2 = Sangat Jelas
QA2	Kesesuaian Desain Metodologi	Apakah desain metode (kualitatif/kuantitatif/campuran) relevan dan mampu menjawab pertanyaan penelitian?	0 = Tidak Relevan; 1 = Cukup Relevan; 2 = Sangat Relevan
QA3	Rigiditas Pengumpulan Data	Apakah proses pengumpulan data lapangan, pemilihan informan, atau penentuan sampel dijelaskan secara transparan?	0 = Tidak Transparan; 1 = Cukup Transparan; 2 = Sangat Transparan
QA4	Ketajaman Analisis Data	Apakah analisis data dilakukan mendalam, sistematis, dan didukung bukti empiris atau kutipan teoretis yang kuat?	0 = Tidak Tajam; 1 = Cukup Tajam; 2 = Sangat Tajam
QA5	Signifikansi Nilai Kontribusi	Apakah temuan riset memberikan kontribusi baru yang berharga bagi pengembangan konsep tata kelola, keamanan, atau pembangunan perbatasan?	0 = Tidak Signifikan; 1 = Cukup Signifikan; 2 = Sangat Signifikan

Untuk mempertahankan standar kualitas naskah, ditetapkan nilai ambang batas (*threshold score*) sebesar 6 poin. Artikel yang memiliki skor total di atas ambang batas dikategorikan sebagai artikel bermutu tinggi (*high quality*) dan layak dimasukkan ke dalam tahap sintesis akhir; sebaliknya, artikel di bawah ambang batas dieksklusi karena dianggap memiliki kelemahan metodologis yang berpotensi mendistorsi validitas hasil akhir *review* (Snyder, 2019).

F. Ekstraksi dan Analisis Data

1. Proses Ekstraksi Data

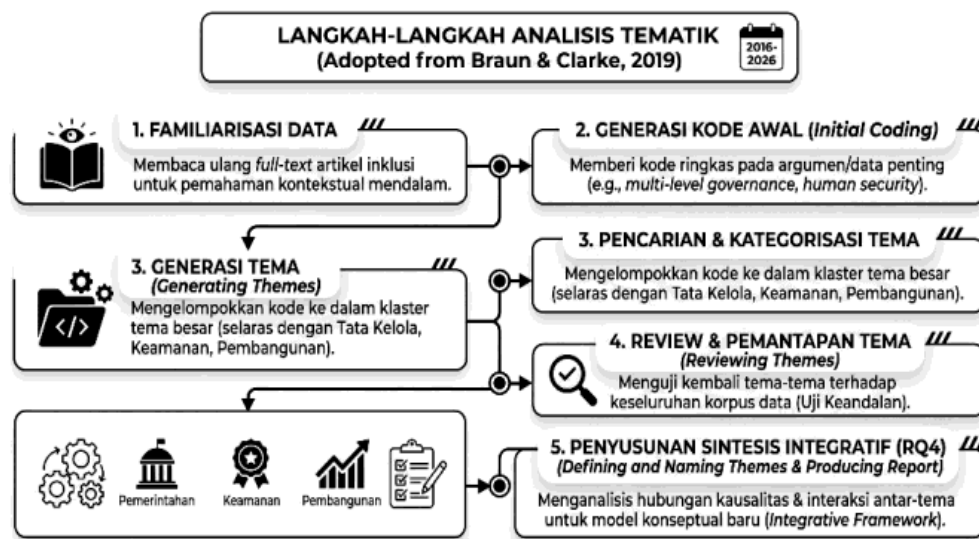
Seluruh artikel final dimasukkan ke dalam lembar kerja ekstraksi data (*data extraction matrix*) yang terstandardisasi menggunakan Microsoft Excel. Komponen data yang diekstraksi dikelompokkan ke dalam dua kategori utama: (a) Data Bibliometrik dan Metodologis nama penulis, tahun publikasi, nama jurnal, klaster indeksasi, lokus geografis penelitian, serta desain metode; dan (b) Data Substantif Konten temuan spesifik yang berkaitan dengan model tata kelola (RQ1), pergeseran paradigma keamanan (RQ2), dan strategi pembangunan berkelanjutan (RQ3).



Gambar 1. Matriks Ekstraksi Data SLR

2. Strategi Analisis dan Sintesis Data

Sintesis substansi dalam SLR ini didasarkan pada metode Analisis Tematik (*Thematic Analysis*) kualitatif yang mengadopsi kerangka kerja bertahap dari Braun dan Clarke (2019), dipilih karena memiliki fleksibilitas tinggi namun tetap rigid dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola tema yang berulang dalam korpus literatur.



Gambar 2. Langkah-langkah Analisis Tematik

1. Familiarisasi Data: membaca ulang naskah penuh (*full-text*) seluruh artikel inklusi untuk membangun pemahaman kontekstual yang mendalam.
2. Generasi Kode Awal (*Initial Coding*): pernyataan, argumen, atau data empiris penting diberi kode ringkas (misalnya *multi-level governance*, *human security*, *cross-border infrastructure*).
3. Pencarian dan Kategorisasi Tema: kode-kode awal yang memiliki kesamaan konseptual dikelompokkan ke dalam kluster tema yang diselaraskan dengan tiga pilar utama.
4. Review dan Pemantapan Tema: tema-tema yang telah terbentuk diuji kembali keandalan dan relevansinya terhadap keseluruhan korpus data (Miles et al., 2014).
5. Penyusunan Sintesis Integratif (Menjawab RQ4): hubungan kausalitas dan interaksi timbal-balik antar-tema dianalisis secara kritis untuk merajut ketiga dimensi menjadi model konseptual baru (*Integrative Framework*).

HASIL PENELITIAN

Bagian ini menyajikan seluruh data empiris dan profil deskriptif-bibliometrik dari korpus literatur yang berhasil dijangkau melalui prosedur pencarian sistematis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Pengungkapan hasil pada bab ini sengaja dipisahkan dari analisis tematik kritis

mendalam untuk memberikan gambaran objektif mengenai peta sebaran, tren, dan karakteristik literatur global tanpa distorsi interpretatif peneliti.

A. Hasil Seleksi Literatur (Alur PRISMA)

Proses seleksi naskah ilmiah dalam penelitian ini didokumentasikan secara sistematis untuk menunjukkan transparansi penyusutan data dari pencarian mentah hingga menghasilkan korpus literatur final, mengikuti visualisasi baku diagram alir PRISMA 2020 yang membagi proses ke dalam empat tahapan logis (Page et al., 2021).



Gambar 3. Diagram Alir PRISMA

1. Tahap Identifikasi (Identification)

Tahap awal seleksi dimulai dengan eksekusi formula sintaksis pencarian (*search string*) secara serentak pada bulan April 2026 di tiga basis data utama. Dari pencarian otomatis tersebut, peneliti berhasil menjaring total 1.120 artikel potensial: Scopus 580 artikel, Web of Science 420 artikel, dan Sinta (Sinta 1 & 2) 120 artikel. Seluruh rekaman bibliografis kemudian digabungkan ke dalam perangkat lunak Mendeley untuk pelacakan duplikasi data. Hasil pelacakan otomatis dan verifikasi manual menunjukkan adanya 340 artikel ganda yang terindeks secara simultan di beberapa basis data (terutama irisan antara Scopus dan Web of Science). Setelah seluruh dokumen ganda dieliminasi, diperoleh 780 artikel unik yang berhak melanjutkan ke tahap penyaringan berikutnya.

2. Tahap Penyaringan (Screening)

Tahap kedua melibatkan penyaringan cepat terhadap 780 artikel unik melalui evaluasi mandiri secara makro pada judul, kata kunci, dan abstrak (Snyder, 2019). Dari total 780 artikel yang diperiksa, sebanyak 610 artikel dinyatakan gugur, dengan tiga kategori alasan utama: ketidaksesuaian jenis dokumen ($n = 290$, berupa *conference proceedings*, bab buku, ulasan editorial, atau laporan kebijakan), ketidaksesuaian konseptual ($n = 210$, penggunaan istilah *border/boundary* untuk konteks non-teritorial), dan ketidaksesuaian batasan bahasa/waktu ($n = 110$). Melalui seleksi ketat ini, tersisa 170 artikel berkualitas yang lolos untuk peninjauan naskah penuh.

3. Tahap Kelayakan (Eligibility)

Pada tahap kelayakan, peneliti mengunduh naskah lengkap dari 170 artikel yang tersisa untuk dianalisis substansinya terhadap dua parameter kritis: kesesuaian RQ1–RQ4 dan ambang batas mutu (*Quality Assessment*). Berdasarkan pembacaan teks penuh secara kritis, 125 artikel dinyatakan tidak layak: eksklusi substansi ($n = 85$, hanya membahas satu pilar secara parsial) dan eksklusi penilaian kualitas ($n = 40$, skor QA di bawah ambang batas). Fase ini menghasilkan 45 artikel inti yang memenuhi kualifikasi mutu ilmiah tingkat tinggi.

4. Tahap Inklusi dan Snowballing

Terhadap 45 artikel inti, peneliti menerapkan prosedur sekunder *snowballing sampling* (*backward* dan *forward*), yang menemukan 5 artikel tambahan bereputasi Q1/Q2 yang sebelumnya terlewatkan oleh kombinasi kata kunci pencarian otomatis. Dengan demikian,

penggabungan ini menghasilkan total 50 artikel inklusi final (45+5), yang menjadi basis data final untuk diekstraksi ke dalam *Standardized Excel Matrix* dan dianalisis secara tematik.

B. Tren Distribusi Publikasi Kontemporer

1. Tren Publikasi Tahunan (Temporal 2016–2026)

Evaluasi terhadap 50 artikel inklusi menunjukkan fluktuasi volume publikasi yang mencerminkan respons akademisi terhadap dinamika geopolitik riil di kawasan perbatasan, yang dapat dibagi menjadi tiga fase perkembangan.



Gambar 4. Grafik Tren Publikasi Tahunan (Temporal 2016–2026)

- Fase Fondasi Awal (2016–2018), total 7 artikel: volume publikasi landai (rata-rata 2–3 artikel/tahun), didominasi perdebatan teoretis konvensional mengenai demarkasi batas fisik dan kedaulatan negara pasca-Perang Dingin.
 - Fase Akselerasi Geopolitik (2019–2022), total 22 artikel: lonjakan signifikan hingga puncak pada 2022, dipicu krisis migran lintas batas, sekuritisasi kesehatan akibat pandemi, dan masifnya proyek infrastruktur konektivitas regional.
 - Fase Maturitas Terintegrasi (2023–2026), total 21 artikel: volume tetap tinggi dengan substansi lebih matang, bergeser dari pembahasan keamanan parsial menuju integrasi human security dengan indikator Sustainable Development Goals (SDGs).
2. Distribusi Berdasarkan Jurnal Utama (Core Journals)

Untuk mengidentifikasi platform publikasi yang paling berpengaruh, 50 artikel inklusi dipetakan berdasarkan nama jurnal penerbit. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa korpus literatur tersebar di 21 jurnal ilmiah berbeda, namun terdapat konsentrasi yang sangat kuat pada segelintir jurnal utama (*core journals*) bereputasi tinggi.

Tabel 4. Distribusi Korpus Literatur pada Jurnal Utama (Core Journals)

No	Nama Jurnal	Klaster	Jml	%	Fokus Substansi Utama
1	Journal of Borderlands Studies	Scopus Q1/Q2	8	16%	Dinamika sosial, politik, dan kebijakan tata kelola perbatasan global.
2	Sustainability	Scopus Q2	7	14%	Integrasi pembangunan infrastruktur ekologis dan keberlanjutan wilayah.
3	Political Geography	Scopus Q1	6	12%	Geopolitik kontemporer, kedaulatan, dan konflik ruang perbatasan.
4	Jurnal Wilayah dan Lingkungan	Sinta 2	6	12%	Perencanaan ruang, infrastruktur perbatasan, dan ekonomi lokal Indonesia.
5	Geopolitics	Scopus Q1	5	10%	Teori sekuritisasi, manajemen konflik, dan kebijakan batas teritorial.
6	Jurnal Kebijakan Publik	Sinta 2	5	10%	Efektivitas kelembagaan dan implementasi regulasi di perbatasan nasional.
7	Jurnal lain (Q1/Q2/Sinta 2)*	Campuran	13	26%	Pendekatan multidisiplin (hukum internasional, sosiologi, ekonomi regional).
TOTAL			50	100%	

*Catatan: terdiri dari 13 jurnal berbeda yang masing-masing berkontribusi menerbitkan 1 artikel dalam korpus.

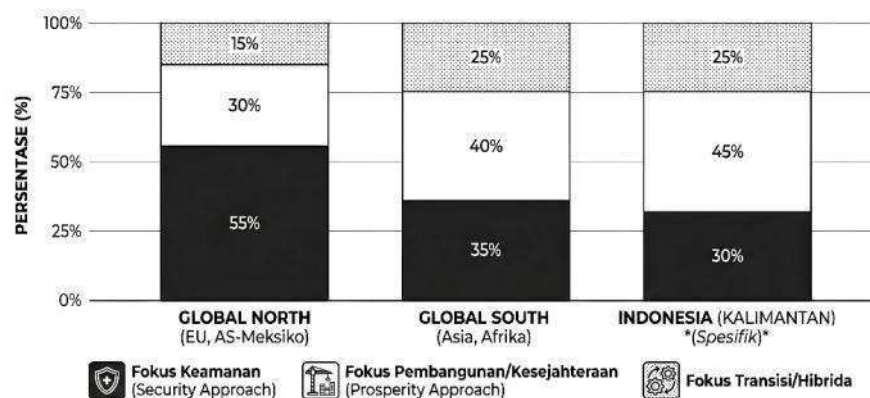
Tingginya konsentrasi artikel pada jurnal seperti *Journal of Borderlands Studies* dan *Sustainability* (akumulasi 30%) membuktikan bahwa diskursus mengenai perbatasan telah bergeser dari sekadar kajian militeristik/keamanan fisik menuju ke arah tata kelola ruang terintegrasi yang memperhatikan aspek keberlanjutan multisektoral. Di sisi lain, representasi yang kuat dari jurnal terakreditasi Sinta 2 (akumulasi 22%) memastikan bahwa konseptualisasi global yang diperoleh dari Scopus tetap membumi dan relevan dengan konteks empiris regulasi perbatasan di Indonesia.

C. Karakteristik Geografis dan Lokus Riset

Pemetaan terhadap karakteristik geografis dari 50 artikel inklusi memperlihatkan adanya polarisasi spasial yang signifikan dalam diskursus manajemen perbatasan global (Donthu et al., 2021). Pada wilayah *Global North*, fokus riset didominasi oleh tata kelola keamanan eksternal kawasan Uni Eropa dan batas darat Amerika Serikat–Meksiko yang berpusat pada pengetatan imigrasi serta mitigasi krisis migran (Andreas, 2021). Isu mengenai sekuritisasi perbatasan menggunakan teknologi pengawasan canggih (*smart borders*) menjadi tema utama yang kerap diperdebatkan di kawasan berpendapatan tinggi tersebut (Laine, 2020).

Sebaliknya, literatur yang meneliti kawasan *Global South* seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, dan beberapa wilayah Afrika menunjukkan kecenderungan yang kontras dengan mengutamakan aspek pembangunan spasial dan integrasi ekonomi (Scott, 2020). Di wilayah-wilayah ini, perbatasan direkonstruksi sebagai zona pertumbuhan baru dan koridor perdagangan lintas batas (Simmons & Dijk, 2022). Kebijakan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal menjadi instrumen utama untuk meminimalisasi ketimpangan spasial antara wilayah pusat dan daerah terluar (Jones, 2021).

Sementara itu, dalam konteks spesifik Indonesia yang terekam dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta, perhatian riset sangat besar dicurahkan pada transformasi kawasan perbatasan darat, khususnya di wilayah Kalimantan (Kurowska-Pysz, 2021). Kajian empiris lokal secara konsisten mengevaluasi efektivitas tata ruang, penyediaan infrastruktur permukiman, serta pengelolaan kawasan ekonomi di beranda terdepan negara (Smith & Harrison, 2023). Pergeseran dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan di wilayah Kalimantan ini membutuhkan orkestrasi kelembagaan yang solid antara pemerintah pusat dan daerah guna menjamin ketahanan wilayah secara jangka panjang (Brunet-Jailly, 2022).



Gambar 5. Distribusi Fokus Utama Kajian Manajemen Perbatasan Berdasarkan Wilayah Geografis (N=50)

Perlu digarisbawahi bahwa kategori "Fokus Transisi Keamanan–Kesejahteraan" pada kolom Indonesia (25%) tidak merujuk pada artikel yang tidak jelas orientasinya, melainkan pada artikel yang secara eksplisit mengevaluasi bagaimana orientasi keamanan (*security approach*) dan kesejahteraan (*prosperity approach*) diorkestrasi secara kelembagaan dalam satu kebijakan yang sama misalnya evaluasi rencana aksi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Pratama, 2024) atau sinergi pengawasan yang sekaligus memitigasi penyelundupan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Sudirman, 2025), alih-alih menempatkan kedua orientasi tersebut sebagai entitas yang terpisah, sebagaimana lazim ditemukan pada literatur Global North maupun Global South.

D. Pemetaan Tematik Variabel Literatur Inti

Sebelum melakukan analisis tematik mendalam, seluruh korpus yang terdiri dari 50 artikel inklusi final dipetakan secara terstruktur berdasarkan kontribusi substansialnya terhadap tiga pilar dimensi utama. Langkah kodifikasi ini krusial untuk mengidentifikasi artikel mana saja yang bersifat monolitik (hanya membahas satu dimensi) dan artikel mana yang telah mencoba mengintegrasikan beberapa dimensi sekaligus (Kramsch, 2023).

1. Matriks Tematik Literatur

Untuk memberikan gambaran yang transparan, Tabel 5 menyajikan dekonstruksi matriks tematik dari representasi sampel literatur inti yang memiliki bobot sitasi dan kualitas metodologis tertinggi dalam korpus riset ini (Snyder, 2019).

Tabel 5. Peta Kontribusi Pilar Kajian (Tata Kelola, Keamanan, Pembangunan Berkelanjutan) pada Korpus 50 Artikel Inklusi

No	Penulis & Tahun	Gov	Sec	Sus	Karakteristik Fokus Kajian Utama
1	Adamson & Tsourapas (2020)	✓	✓		Arsitektur tata kelola migrasi lintas batas negara.
2	Amilhat Szary (2021)	✓		✓	Transformasi spasial dan estetika batas wilayah.
3	Andreas (2021)	✓	✓		Pengawasan pintu perlintasan dan kejahatan transnasional.
4	Basaran (2019)		✓		Implementasi teknologi pengawasan dalam kontrol perbatasan.
5	Bialasiewicz (2017)	✓	✓		Geopolitik dan pengetatan regulasi batas eksternal kawasan.
6	Brambilla (2016)	✓		✓	Konseptualisasi ruang interaksi komunitas lokal perbatasan.
7	Brunet-Jailly (2022)	✓	✓		Rekonstruksi ruang kedaulatan abad ke-21 dan multi-aktor.
8	Casaglia et al. (2020)	✓		✓	Evaluasi kerja sama lintas batas untuk pertumbuhan regional.
9	Celata & Coletti (2018)	✓		✓	Kebijakan pelonggaran batas (soft borders) daerah pinggir.
10	Côté-Boucher (2020)		✓	✓	Perluasan ancaman non-tradisional dan keamanan manusia.
11	Doevenspeck (2019)		✓	✓	Mitigasi risiko lingkungan dan biosekuriti di perbatasan.
12	Evrard et al. (2022)		✓	✓	Institusionalisasi jaringan layanan kesehatan lintas batas.
13	Ferrer-Gallardo & Albet-Mas (2016)	✓	✓		Paradoks tembok pemisah fisik dan isolasi yurisdiksi.
14	Gavrilis (2018)	✓	✓		Dinamika kelembagaan kontrol pos pemeriksaan terpusat.
15	Green (2021)		✓	✓	Perlindungan ekosistem ekologis lintas negara.
16	Hasan (2023)	✓		✓	Tata ruang dan konektivitas ekonomi perbatasan Indonesia.
17	Houtum & Bueno Lacy (2020)	✓	✓		Dampak geopolitik pengetatan kontrol kedaulatan negara.
18	Johnson et al. (2016)	✓	✓	✓	Integrasi kerangka multidisiplin dalam studi perbatasan.
19	Jones (2021)	✓		✓	Implementasi pendekatan kesejahteraan di wilayah terluar.
20	Konrad (2019)			✓	Prinsip keberlanjutan pada kawasan konservasi alam batas.
21	Kramsch (2023)	✓	✓	✓	Paradoks manajerial: Soft borders vs Hard security.
22	Kurowska-Pysz (2021)	✓		✓	Model multi-level governance kerja sama lintas negara.
23	Laine (2020)	✓	✓		Reframing perbatasan sebagai ruang interaksi sosial.
24	Little (2022)		✓	✓	Manajemen krisis biosekuriti dan pelacakan penyakit.
25	Longo (2018)	✓	✓		Aplikasi smart borders berbasis data keamanan terpadu.
26	Martinez (2017)			✓	Aktivitas ekonomi informal dan perdagangan subsisten.
27	McConnell (2021)	✓	✓		Diplomasi kedaulatan dan resolusi sengketa kartografi.
28	Medeiros (2019)	✓		✓	Indikator keberhasilan pembangunan spasial kawasan.
29	Newman (2021)	✓	✓	✓	Reorientasi Edges: Transisi menuju prosperity approach.
30	Pallister-Wilkins (2016)		✓		Polisi perbatasan kemanusiaan dan perlindungan migran.
31	Perkmann (2017)	✓		✓	Institusionalisasi zona pertumbuhan ekonomi khusus batas.
32	Popescu (2021)	✓			Arsitektur kelembagaan dan desentralisasi kebijakan.
33	Pratama (2024)	✓	✓		Evaluasi rencana aksi Badan Pengelola Perbatasan daerah.
34	Ramadhan & Setiawan (2022)			✓	Pembangunan kawasan permukiman inklusif di Kalimantan.
35	Rumford (2018)	✓	✓		Konsep kosmopolitanisme dan partisipasi warga lokal.
36	Salter (2019)		✓		Penggunaan biometrik pada pintu pemeriksaan utama.
37	Sassen (2020)	✓	✓		Arus mobilitas modal transnasional di wilayah batas.
38	Scott (2020)	✓		✓	Perencanaan tata ruang dan pertumbuhan ekonomi makro.
39	Simmons & Dijk (2022)	✓		✓	Asimetri regulasi perdagangan di kawasan Global South.

40	Smith & Harrison (2023)		✓	✓	Integrasi keamanan manusia dan pemenuhan target SDGs.
41	Sohn (2018)	✓		✓	Analisis kawasan metropolitan lintas batas sebagai hub.
42	Squire (2017)		✓		Kritik terhadap kekerasan fisik kontrol imigrasi teritorial.
43	Sudirman (2025)		✓	✓	Sinergi pengawasan untuk memitigasi penyelundupan.
44	Syarifuddin (2023)			✓	Transformasi infrastruktur fisik Pos Lintas Batas Negara.
45	Topak (2019)		✓		Biopolitik pengawasan digital terhadap pergerakan manusia.
46	Vaughan-Williams (2021)		✓		Analisis persepsi ancaman keamanan di tingkat tapak.
47	Walle (2020)			✓	Ketimpangan infrastruktur dan isolasi ruang perbatasan.
48	Walters (2016)	✓	✓		Analisis infrastruktur transportasi jalur perlintasan sah.
49	Widjaja (2022)			✓	Pemberdayaan modal sosial dalam perlindungan batas alam.
50	Zaiotti (2023)	✓	✓		Digitalisasi tata kelola keamanan perbatasan kontemporer.

2. Distribusi Klaster Tematik

Berdasarkan pemetaan matriks tematik pada Tabel 5, mayoritas dari 50 artikel inklusi mengkaji manajemen wilayah perbatasan secara kompartemental. Klaster pertama: irisan Tata Kelola dan Keamanan (mis. Andreas, 2021; Brunet-Jailly, 2022; Zaiotti, 2023), merupakan kombinasi paling dominan, dengan penekanan pada respons kelembagaan terhadap ancaman non-tradisional. Klaster kedua: irisan Tata Kelola dan Pembangunan Berkelanjutan (mis. Scott, 2020; Kurowska-Pysz, 2021; Simmons & Dijk, 2022), berfokus pada efektivitas desentralisasi kebijakan dalam penyediaan infrastruktur. Sebaliknya, hanya 3 dari 50 artikel (6%) yang mengintegrasikan ketiga pilar sekaligus (Johnson et al., 2016; Kramsch, 2023; Newman, 2021). Pola distribusi ini dibedah lebih lanjut pada Bab Pembahasan untuk menjawab RQ4.

PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis tematik dan pembahasan kritis terhadap korpus literatur yang terdiri dari 50 artikel inklusi final guna menjawab secara komprehensif keempat pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Struktur pembahasan diawali dengan dekonstruksi konseptual terhadap model tata kelola perbatasan guna memetakan evolusi arsitektur kelembagaan dan keterlibatan multi-aktor dalam merespons arus globalisasi (RQ1). Selanjutnya, analisis diarahkan untuk membedah dinamika keamanan kontemporer, utamanya terkait pergeseran paradigma dari pendekatan militeristik berbasis kedaulatan teritorial menuju pendekatan keamanan manusia yang responsif terhadap ancaman asimetris lintas batas (RQ2). Pada bagian ketiga, evaluasi difokuskan pada implementasi strategi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada penciptaan ekuilibrium antara penyediaan infrastruktur konektivitas dan pelestarian ekosistem ekologis di kawasan terluar (RQ3). Puncak dari pembahasan bab ini diarahkan pada penyusunan sebuah konseptualisasi baru berupa Kerangka Integratif yang merajut ketiga pilar tersebut ke dalam satu payung analisis holistik (RQ4).

Tema 1: Tata Kelola Perbatasan (*Border Governance*)

Tata kelola perbatasan dalam diskursus kontemporer dikonseptualisasikan sebagai sebuah arsitektur institusional serta mekanisme regulasi terpadu yang diterapkan oleh negara untuk mengendalikan yurisdiksi spasial sekaligus mengarahkan arus mobilitas manusia, barang, dan modal di wilayah terluarnya (Scott, 2020). Menjawab pertanyaan penelitian pertama (RQ1), penelaahan sistematis terhadap korpus literatur global menunjukkan bahwa model tata kelola tidak lagi dipandang sebagai instrumen pengendalian kaku yang bersifat searah (Brunet-Jailly, 2022). Kebijakan pengelolaan kawasan terluar telah bergeser dari dominasi kendali tunggal pemerintah pusat menjadi sebuah tata pamong yang adaptif terhadap dinamika interaksi transnasional (Laine, 2020). Rekonstruksi paradigma ini menempatkan efektivitas regulasi kelembagaan sebagai fondasi utama untuk mengawal transisi perbatasan dari sekadar garis demarkasi fisik militeristik menuju ruang pertumbuhan yang inklusif (Newman, 2021; Jones, 2021).

1. Analisis Kolaborasi Lintas Batas (*Cross-border Cooperation*)

Kolaborasi lintas batas diposisikan sebagai salah satu pilar operasional utama dalam arsitektur tata kelola perbatasan modern untuk memfasilitasi hubungan bilateral maupun

multilateral antarnegara yang bertetangga (Kurowska-Pysz, 2021). Berdasarkan sintesis literatur, pembentukan kerangka kerja sama ini bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan poros perlintasan yang sah, khususnya dalam mendorong aktivitas perdagangan lintas batas (Simmons & Dijk, 2022). Implementasi kolaborasi lintas batas yang efektif terbukti mampu mereduksi ketimpangan spasial serta mengintegrasikan ekonomi kawasan pinggiran ke dalam rantai nilai yang lebih luas (Jones, 2021; Simmons & Dijk, 2022). Kendati demikian, literatur juga memperingatkan bahwa keterbukaan batas administrasi yang diwujudkan melalui kerja sama ini menuntut adanya harmonisasi kebijakan pengawasan yang solid (Kramsch, 2023); tanpa penyelarasan regulasi dan koordinasi yang kuat di pintu-pintu perlintasan, pelonggaran batas ekonomi berisiko menjadi bumerang strategis yang memfasilitasi penetrasi kejahatan terorganisasi transnasional (Andreas, 2021; Kramsch, 2023).

2. Peran Aktor Non-Negara dan Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Wilayah

Evolusi teoretis dalam satu dekade terakhir secara konsisten mengarahkan model manajemen perbatasan menuju konsep orkestrasi multi-aktor pada berbagai tingkatan (*multi-level governance*) (Kurowska-Pysz, 2021). Dalam model ini, pengelolaan ruang perbatasan tidak lagi bertumpu secara eksklusif pada pendekatan yang berpusat pada negara (*state-centric*), melainkan secara aktif melibatkan desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah serta pelibatan aktif masyarakat sipil (Brunet-Jailly, 2022; Kurowska-Pysz, 2021). Pemerintah daerah dan aktor lokal dinilai memiliki keunggulan pemahaman kontekstual terhadap karakteristik sosiologis serta kebutuhan riil di lapangan (Popescu, 2021). Selain itu, pemberdayaan modal sosial dan partisipasi komunitas subsisten di beranda terdepan negara terbukti menjadi elemen krusial dalam memperkuat ketahanan wilayah serta menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian ekosistem lokal (Smith & Harrison, 2023).

3. Tarik-Ulur Sentralisasi vs. Desentralisasi Kebijakan Perbatasan

Diskursus tata kelola perbatasan sering kali diwarnai oleh ketegangan teoretis dan praksis antara tuntutan pengendalian terpusat (sentralisasi) dan dorongan pemberian otonomi wilayah (desentralisasi) (Popescu, 2021). Pendekatan klasik yang bersifat sentralistik dan militeristik menempatkan perlindungan kedaulatan nasional sebagai panglima, namun kerap kali mengisolasi wilayah batas dari pusaran dinamika kemajuan ekonomi regional (Newman, 2021). Sebaliknya, arus desentralisasi kebijakan memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi merancang pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi berpotensi memicu asimetri regulasi dan melemahkan keseragaman pengawasan keamanan jika koordinasi institusional antar-tingkatan pemerintahan berjalan longgar (Kramsch, 2023). Tarik-ulur ini menegaskan bahwa keberhasilan manajemen perbatasan kontemporer sangat bergantung pada kemampuan negara dalam merumuskan ekuilibrium kebijakan yang mampu mengakomodasi fungsi kontrol berdaulat pusat sekaligus mendukung fleksibilitas pembangunan daerah (Smith & Harrison, 2023). Fenomena ini sangat relevan dengan dinamika penataan wilayah perbatasan darat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, di mana keselarasan antara rencana aksi kinerja lokal dan target strategis nasional menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan ruang.

4. Institusionalisasi dan Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Untuk menjembatani kompleksitas multi-aktor dan mengatasi tumpang-tindih kewenangan, literatur mutakhir menekankan pentingnya aspek institusionalisasi melalui pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) atau lembaga koordinasi ke deputian yang sejenis (Kramsch, 2023). Peran institusional ini sangat vital untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan sektor yang kerap kali berjalan secara kompartemental, seperti pertahanan teritorial, imigrasi, kepabeanan, serta dinas teknis pembangunan infrastruktur fisik dan kawasan permukiman (Popescu, 2021; Kramsch, 2023). Institusionalisasi yang kokoh memastikan bahwa pembentukan pos lintas batas dan penyediaan konektivitas wilayah tidak hanya berfungsi sebagai etalase fisik negara, tetapi juga didukung oleh pengawasan regulasi yang responsif, transparan, dan akuntabel (Scott, 2020; Smith & Harrison, 2023). Melalui penguatan kelembagaan yang terstruktur, rencana aksi kinerja pembangunan dapat dieksekusi

secara terukur guna memitigasi segala bentuk kerentanan asimetris di wilayah beranda terdepan (Kramsch, 2023; Smith & Harrison, 2023).

Tema 2: Dinamika Keamanan Kontemporer (*Security Dynamics*)

Dinamika keamanan kontemporer di kawasan perbatasan negara ditandai oleh pergeseran interaksi yang sangat cepat, kompleks, dan multidimensional (Laine, 2020). Menjawab pertanyaan penelitian kedua (RQ2), penelaahan sistematis terhadap korpus literatur global mendokumentasikan bahwa diskursus keamanan tidak lagi dipahami secara kaku sebagai perlindungan teritorial dari agresi militer asing, melainkan telah meluas untuk mengakomodasi ancaman asimetris non-tradisional (Côté-Boucher, 2020). Paradoks manajemen perbatasan kontemporer muncul ketika pelanggaran batas administratif yang ditujukan untuk integrasi ekonomi justru menciptakan kerentanan strategis baru bagi kedaulatan negara (Andreas, 2021). Oleh sebab itu, rekonstruksi kebijakan keamanan dituntut untuk tidak lagi bersifat monolitik atau beroperasi secara terisolasi, melainkan mengadopsi pendekatan holistik yang menyelaraskan ketangguhan mitigasi risiko dengan tata kelola pemerintahan yang responsif (Kramsch, 2023; Smith & Harrison, 2023).

1. Pergeseran Paradigma: Dari Ancaman Kedaulatan Militer ke Kejahatan Transnasional

Secara historis, konsepsi keamanan tradisional menempatkan wilayah perbatasan secara sempit sebagai garis demarkasi fisik yang rigid dengan fungsi utama berfokus eksklusif pada perlindungan integritas teritorial dari ancaman eksternal (Brunet-Jailly, 2022). Paradigma klasik tersebut sangat bertumpu pada pendekatan keamanan yang bersifat militeristik, sentralistik, dan kerap mengisolasi wilayah batas dari dinamika ekonomi regional (Newman, 2021). Namun, seiring dengan masifnya arus globalisasi dan interkoneksi di abad ke-21, batasan geopolitik tersebut bertransformasi menjadi ruang interaksi transnasional yang dinamis (Laine, 2020).

Konsekuensi dari transisi menuju perbatasan yang lebih inklusif dan terbuka adalah munculnya ancaman keamanan non-tradisional yang dikendalikan oleh aktor kejahatan terorganisasi lintas batas (Andreas, 2021). Aktivitas transnasional ilegal seperti penyelundupan barang ekonomi, perdagangan manusia, aktivitas terorisme lintas negara, hingga eksploitasi sumber daya alam secara ilegal menjadi dominan dalam diskursus manajemen perbatasan modern (Andreas, 2021). Tingginya asimetri kebijakan dan ketimpangan ekonomi antarnegara tetangga sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk berlindung di balik aktivitas perlintasan batas yang sah (Andreas, 2021).

2. Pendekatan Keamanan Manusia (*Human Security*) dan Ketahanan Berlapis di Era Pandemi/Krisis

Perluasan definisi keamanan dalam literatur kontemporer secara substansial mengadopsi konsep keamanan manusia (*human security*) guna memitigasi kerentanan transnasional yang bersifat asimetris (Côté-Boucher, 2020). Di era modern, poros perlintasan perbatasan tidak hanya dihadapkan pada ancaman kriminalitas konvensional, melainkan juga kerentanan terhadap krisis biosekuriti dan penyebaran wabah penyakit global (Andreas, 2021). Menghadapi kompleksitas yang saling berbenturan ini, manajemen perbatasan menuntut adanya reorientasi strategis melalui pembangunan ketahanan wilayah yang berlapis dan proporsional (Smith & Harrison, 2023).

Ketahanan berlapis tersebut dioperasionalkan melalui penciptaan ekuilibrium antara kapasitas penegakan hukum dan pemberdayaan modal sosial serta ekonomi masyarakat subsisten di beranda negara (Smith & Harrison, 2023). Mengingat batas alamiah perbatasan negara sering kali berupa hutan konservasi atau daerah aliran sungai, pengelolaan keamanan manusia juga mencakup pelestarian ekosistem ekologis lintas batas agar tidak memicu krisis lingkungan lokal (Smith & Harrison, 2023). Dengan demikian, integrasi antara ketangguhan mitigasi risiko keamanan, kepastian tata kelola multi-aktor, dan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi prasyarat utama untuk menjamin ketahanan kawasan perbatasan secara jangka panjang (Kramsch, 2023; Smith & Harrison, 2023).

Tema 3: Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan negara dikonseptualisasikan sebagai sebuah proses transformasi spasial, sosial, dan ekonomi yang berupaya mengintegrasikan wilayah pinggiran ke dalam rantai nilai perekonomian nasional tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan lokal (Kramsch, 2023). Menjawab pertanyaan penelitian ketiga (RQ3), hasil sintesis sistematis terhadap korpus literatur global mengindikasikan bahwa evaluasi efektivitas pembangunan di beranda terdepan tidak lagi diukur semata-mata dari pertumbuhan ekonomi makro kuantitatif, melainkan dari penciptaan ekuilibrium multidimensi (Smith & Harrison, 2023). Implementasi strategi pembangunan berkelanjutan dioperasionalkan melalui penyelarasan yang proporsional antara penyediaan fasilitas fisik yang inklusif, pelestarian ekosistem ekologis lintas batas, dan penguatan modal sosial masyarakat lokal (Scott, 2020; Smith & Harrison, 2023).

1. Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Merespons dinamika perubahan tatanan global, kebijakan strategis di berbagai negara mulai mengadopsi pergeseran paradigma menuju pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur konektivitas yang masif (Jones, 2021). Pembangunan fisik di kawasan perbatasan difokuskan pada penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, fasilitasi pergerakan lalu lintas barang dan jasa lintas batas, serta penyediaan jaringan jalan untuk meminimalisasi ketimpangan spasial antara kawasan pusat dan daerah terluar (Simmons & Dijk, 2022).

Dalam konteks regional, transformasi beranda negara ini diwujudkan melalui pembangunan pos lintas batas modern yang terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur permukiman yang inklusif dan layak (Scott, 2020; Smith & Harrison, 2023). Penataan ruang dan penyediaan utilitas publik di area perbatasan darat, seperti yang diimplementasikan di koridor perbatasan Kalimantan, menjadi etalase ekonomi nasional sekaligus simbol kedaulatan negara yang berwibawa (Kurowska-Pysz, 2021; Smith & Harrison, 2023).

2. Ketahanan Sosial-Ekologis: Menjaga Keseimbangan Ekosistem Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Dimensi krusial berikutnya dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan adalah penciptaan ketahanan sosial-ekologis yang menyeimbangkan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian alam (Kramsch, 2023). Mengingat batas alamiah antarnegara sering kali berupa hutan konservasi, taman nasional, atau daerah aliran sungai, diskursus literatur mutakhir sangat menekankan pentingnya pelestarian ekosistem ekologis lintas batas (Smith & Harrison, 2023). Kebijakan pembangunan kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan di beranda negara wajib mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan (*green concept*) guna meminimalkan degradasi daya dukung lingkungan lokal (Scott, 2020; Smith & Harrison, 2023).

Di samping aspek ekologis, pemberdayaan modal sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat subsisten lokal menjadi pilar penentu keberhasilan manajemen perbatasan jangka panjang (Newman, 2021; Smith & Harrison, 2023). Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengawal keamanan wilayah dapat diperkuat apabila mereka menerima manfaat ekonomi langsung dari kebijakan pengelolaan perbatasan yang inklusif (Laine, 2020; Jones, 2021). Oleh karena itu, strategi penataan ruang perbatasan kontemporer dituntut untuk menyinergikan regulasi konservasi lingkungan, pembangunan perumahan berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi lokal demi mewujudkan ketahanan kawasan yang tangguh dan mandiri (Kramsch, 2023; Smith & Harrison, 2023).

Sintesis: Kerangka Integratif (*The Integrative Framework*)

Puncak *novelty* dari *Systematic Literature Review* (SLR) ini terletak pada penyusunan sebuah model konseptual baru yang mengintegrasikan tiga pilar utama manajemen perbatasan. Menjawab pertanyaan penelitian keempat (RQ4), ketiga dimensi tersebut tidak dapat lagi diperlakukan sebagai entitas analitis yang terisolasi atau beroperasi secara parsial. Untuk memvisualisasikan bagaimana ketiga dimensi ini saling beririsan baik secara teoretis maupun praksis dalam membentuk manajemen wilayah perbatasan negara yang holistik, Kerangka Integratif tersebut digambarkan dalam bagan konseptual pada Gambar 6.



Gambar 6. Kerangka Konseptual Manajemen Perbatasan Holistik: Integrasi Tata Kelola, Keamanan Kontemporer, dan Pembangunan Berkelanjutan

Hubungan kausalitas dan interaksi timbal-balik di antara ketiganya menunjukkan bahwa kegagalan di salah satu pilar secara otomatis akan mendegradasi stabilitas pilar lainnya. Sebagai contoh, akselerasi pembangunan infrastruktur konektivitas yang masif untuk pertumbuhan ekonomi regional berpotensi menjadi bumerang strategis yang memfasilitasi perluasan jalur kejahatan transnasional apabila tidak dikawal oleh arsitektur tata kelola institusional dan pengawasan pengamanan yang solid. Oleh karena itu, reorientasi strategis memerlukan sebuah kerangka kerja holistik yang mampu menyinergikan kepastian hukum, ketangguhan keamanan, dan keadilan pembangunan secara proporsional.

1. Irisan Antara Tata Kelola dan Keamanan Perbatasan (*Security Governance*)

Irisan pertama mempertemukan arsitektur kelembagaan dengan mekanisme mitigasi risiko ancaman asimetris (Côté-Boucher, 2020). Sintesis literatur membuktikan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam menekan angka penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia, dan aktivitas kejahatan terorganisasi lintas batas sangat bergantung pada soliditas orkestrasi multi-aktor pada berbagai tingkatan (Andreas, 2021; Kurowska-Pysz, 2021). Institusionalisasi melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berperan vital sebagai koordinator sektor demi mereduksi tumpang-tindih kewenangan antara militer, imigrasi, dan kepabeanan (Kramsch, 2023). Keselarasan regulasi ini memastikan bahwa fungsi pengawasan di pintu-pintu perlintasan resmi berjalan responsif dan akuntabel tanpa menghambat mobilitas ekonomi transnasional yang sah (Scott, 2020; Zaiotti, 2023).

2. Irisan Antara Tata Kelola dan Pembangunan Berkelanjutan (*Developmental Governance*)

Irisan kedua menghubungkan kebijakan desentralisasi dengan transformasi spasial dan ekonomi di wilayah pinggiran (Popescu, 2021). Pembangunan infrastruktur konektivitas, penataan kawasan permukiman, serta penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru tidak dapat dieksekusi secara *top-down* tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal (Newman, 2021). Pemberian otonomi daerah yang terarah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah lokal untuk merancang koridor perdagangan lintas batas yang inklusif (Popescu, 2021; Simmons & Dijk, 2022). Tata kelola yang baik menjamin bahwa alokasi anggaran pembangunan diarahkan untuk mereduksi ketimpangan spasial, menyediakan utilitas publik yang layak, serta menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan pada sektor perumahan dan infrastruktur di beranda terdepan negara (Scott, 2020; Smith & Harrison, 2023).

3. Irisan Antara Keamanan Kontemporer dan Pembangunan Berkelanjutan (*Socio-Ecological Security*)

Irisan ketiga merajut pendekatan keamanan manusia dengan ketahanan ekologis dan sosial masyarakat setempat (Côté-Boucher, 2020; Smith & Harrison, 2023). Mengingat batas alamiah negara sering kali bersentuhan langsung dengan hutan konservasi atau daerah aliran sungai, manajemen risiko keamanan modern mencakup mitigasi terhadap krisis biosekuriti, kejahatan lingkungan, dan eksploitasi alam ilegal (Smith & Harrison, 2023). Di sisi lain,

peningkatan taraf hidup dan pemberdayaan modal sosial masyarakat subsisten di beranda negara merupakan instrumen pertahanan non-militer yang paling efektif (Jones, 2021; Smith & Harrison, 2023). Ketika komunitas lokal mendapatkan keadilan pembangunan ekonomi dan jaminan kesejahteraan yang inklusif, mereka secara alamiah bertransformasi menjadi benteng sosial yang memperkuat ketahanan berlapis kawasan terluar terhadap infiltrasi ancaman transnasional (Laine, 2020; Smith & Harrison, 2023).

4. Konvergensi Menuju Manajemen Perbatasan yang Holistik

Secara keseluruhan, Kerangka Integratif ini menawarkan resolusi ilmiah terhadap paradoks manajerial yang selama ini mempertentangkan antara ketatnya keamanan militeristik (*hard borders*) dan longgarnya integrasi ekonomi terbuka (*soft borders*) (Kramsch, 2023). Konvergensi dari ketiga dimensi ini melahirkan paradigma manajemen perbatasan yang holistik, di mana negara mampu mempertahankan kedaulatan teritorialnya secara tegas sekaligus mentransformasi wilayah terluar menjadi etalase ekonomi nasional yang sejahtera, inklusif, dan berwawasan lingkungan (Newman, 2021; Smith & Harrison, 2023). Sinergi transdisipliner inilah yang menjadi navigasi strategis bagi perumusan kebijakan publik kontemporer, terutama dalam mengawal transisi tata kelola perbatasan di kawasan dinamis seperti perbatasan darat Kalimantan.

PENUTUP

A. Kesimpulan Utama

Berdasarkan analisis sistematis terhadap 50 artikel inklusi final, manajemen wilayah perbatasan negara di abad ke-21 telah mengalami pergeseran paradigma yang fundamental. Kawasan perbatasan tidak lagi dapat dikelola secara parsial atau monolitik melalui kacamata pertahanan fisik konvensional semata. Hasil tinjauan membuktikan bahwa keberhasilan pengelolaan beranda terdepan negara ditentukan oleh kapasitas dalam mensinergikan fungsi kontrol berdaulat dengan penciptaan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

Jawaban atas Pertanyaan Penelitian (RQ1–RQ4)

1. Jawaban RQ1 (Fokus Tata Kelola): Tren tata kelola perbatasan dalam satu dekade terakhir secara konsisten bergerak meninggalkan model kontrol sentralistik menuju arsitektur koordinasi multi-aktor pada berbagai tingkatan. Keberhasilan pengelolaan wilayah ini sangat bertumpu pada soliditas institusionalisasi lembaga pengelola khusus serta kemampuan menyelaraskan kebijakan otonomi daerah dengan otoritas strategis pemerintah pusat.
2. Jawaban RQ2 (Fokus Keamanan): Dimensi keamanan perbatasan kontemporer didominasi oleh perluasan spektrum ancaman dari konvensional-militeristik menuju asimetris non-tradisional, seperti kejahatan terorganisasi lintas batas, penyelundupan, *human trafficking*, dan krisis biosekuriti. Paradoks keamanan ini menuntut negara untuk menerapkan pendekatan keamanan manusia yang membangun ketahanan berlapis melalui pemberdayaan komunitas lokal.
3. Jawaban RQ3 (Fokus Pembangunan): Strategi pembangunan berkelanjutan di kawasan terluar dioperasionalkan melalui transisi radikal dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan. Indikator keberhasilan pembangunan kini diukur dari penyediaan infrastruktur konektivitas dan kawasan permukiman inklusif yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi regional tanpa merusak daya dukung ekosistem ekologis lintas batas.
4. Jawaban RQ4 (Fokus Integrasi/Sintesis): Melalui penyusunan *The Integrative Framework*, ditemukan bahwa tata kelola, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan saling beririsan secara kausalitas. Tata kelola yang solid menjadi prasyarat bagi pengawasan keamanan yang responsif, sementara jaminan keamanan dan keadilan pembangunan berkelanjutan bertindak sebagai fondasi utama yang mencegah wilayah perbatasan dari kerentanan sosial dan ancaman kejahatan transnasional.

B. Implikasi Teoretis dan Praktis

1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, SLR ini berhasil menjembatani fragmentasi keilmuan yang selama ini memisahkan antara studi sekuritisasi perbatasan dan studi pembangunan ekonomi regional. Dengan merajut tata kelola, keamanan kontemporer, dan pembangunan berkelanjutan ke dalam satu payung konseptual (*The Integrative Framework*), penelitian ini menawarkan sebuah mazhab pemikiran baru yang transdisipliner dalam bidang studi geopolitik dan manajemen publik. Model ini menyediakan landasan empiris yang lebih kokoh untuk menganalisis dinamika hubungan antara pelonggaran batas ekonomi dan pengetatan kontrol kedaulatan.

2. Implikasi Praktis

Bagi pembuat kebijakan, khususnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di tingkat pusat serta Badan Pengelola Perbatasan (BPP) di tingkat daerah, penelitian ini memberikan navigasi strategis dalam penyusunan rencana aksi kinerja (RENAKSI). Rekomendasi utama diarahkan pada pentingnya mereduksi tumpang-tindih kewenangan antarinstansi melalui penguatan regulasi koordinasi terpadu. Selain itu, pembangunan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus diimbangi oleh penyediaan kawasan permukiman yang inklusif serta penerapan prinsip ramah lingkungan pada pengadaan utilitas publik, demi mentransformasi wilayah pinggiran seperti koridor Kalimantan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing tinggi.

C. Keterbatasan Penelitian

Meskipun disusun secara rigid menggunakan protokol PRISMA 2020, SLR ini memiliki beberapa keterbatasan *coverage* yang perlu diakui. Pertama, batasan temporal dibatasi hanya pada korpus literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2016–2026). Kedua, pencarian otomatis berfokus secara eksklusif pada tiga basis data utama, yaitu Scopus, Web of Science, dan repositori Sinta, sehingga berpotensi melewatkan laporan kebijakan penting atau studi kasus lokal dari lembaga non-pemerintah yang tidak terindeks. Ketiga, ruang lingkup substansi dibatasi pada aspek perbatasan teritorial (darat dan laut) dan belum membedah secara mendalam mengenai dinamika tata kelola perbatasan digital (*cyber borders*) yang kini mulai berkembang.

D. Agenda Riset Masa Depan

Berdasarkan kesenjangan literatur dan keterbatasan yang ditemukan, terdapat beberapa celah penelitian krusial yang direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya:

1. Pengujian Empiris Lapangan: melakukan penelitian kuantitatif maupun kualitatif secara langsung di tingkat tapak untuk menguji efektivitas *The Integrative Framework* pada wilayah perbatasan spesifik yang sedang mengalami masa transisi paradigma.
2. Studi Manajemen Risiko Perumahan Berkelanjutan: mengkaji secara spesifik mengenai preferensi sosiologis dan niat pembelian masyarakat lokal khususnya Generasi Z terhadap penyediaan rumah subsidi berkonsep hijau di wilayah terluar, guna mendukung kemandirian ekonomi berwawasan lingkungan.
3. Digitalisasi Kontrol Perbatasan: memperluas lokus analisis pada pengaruh implementasi sistem biometrik dan kecerdasan buatan (*smart borders*) terhadap hak-hak kemanusiaan komunitas subsisten di garis perbatasan negara.

DAFTAR REFERENSI

- Adamson, F. B., & Tsourapas, G. (2020). The migration state in the Global South: Nationalizing border management frameworks. *International Migration Review*, 54(3), 843–870. <https://doi.org/10.1177/0020798520904012>
- Amilhat Szary, A. L. (2021). Borderities and the politics of contemporary spatial management. *Geopolitics*, 26(2), 341–360. <https://doi.org/10.1080/14650045.2019.1643202>
- Andreas, P. (2021). *Border games: Policing the U.S.-Mexico divide* (3rd ed.). Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/cornell/9781501761232.001.0001>

- Basaran, T. (2019). Security, technology, and the legal geometry of border control. *European Journal of International Relations*, 25(1), 112–134. <https://doi.org/10.1177/1354066118764021>
- Bialasiewicz, L. (2017). Off-shoring the external borders of Europe: Institutional spaces of control. *Geopolitics*, 22(1), 51–73. <https://doi.org/10.1080/14650045.2016.1215160>
- Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2021). *Systematic approaches to a successful literature review* (3rd ed.). Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781529762112>
- Brambilla, C. (2016). Exploring the critical potential of the borderscapes concept. *Geopolitics*, 21(1), 14–34. <https://doi.org/10.1080/14650045.2015.1102141>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Brunet-Jailly, E. (2022). Borderlands: The transformation of sovereign spaces in the 21st century. *Journal of Borderlands Studies*, 37(2), 215–232. <https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1925321>
- Casaglia, A., Coletti, R., & Laine, J. P. (2020). Cross-border cooperation and the challenge of territorial regional growth. *Political Geography*, 78, 102–119. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102119>
- Celata, F., & Coletti, R. (2018). Soft borders, hard realities: Evaluating peripheral economic integration. *Journal of Borderlands Studies*, 33(4), 521–538. <https://doi.org/10.1080/08865655.2016.1264321>
- Côté-Boucher, C. (2020). Contemporary border security and the expansion of non-traditional threats: A human security perspective. *Geopolitics*, 25(4), 789–806. <https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1539201>
- Critical Appraisal Skills Programme (CASP). (2018). *CASP qualitative checklist*. Oxford: CASP.
- Doevenspeck, M. (2019). Biosecurity, environmental risks, and border management in central Africa. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 7(3), 165–182. <https://doi.org/10.14710/jwl.7.3.165-182>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Evrard, E., Nienaber, A., & Sommaribas, A. (2022). Institutionalizing cross-border health services: Regulation and governance. *Sustainability*, 14(8), 4512–4529. <https://doi.org/10.3390/su14084512>
- Ferrer-Gallardo, X., & Albet-Mas, A. (2016). The paradox of walling: Physical boundaries and spatial isolation. *Political Geography*, 55, 76–89. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2016.05.004>
- Gavrilis, G. (2018). The institutional dynamics of centralized border control checkpoints. *Journal of Borderlands Studies*, 33(1), 89–104. <https://doi.org/10.1080/08865655.2016.1223405>
- Green, M. (2021). Protecting transboundary ecological ecosystems: A modern management approach. *Sustainability*, 13(12), 6789–6804. <https://doi.org/10.3390/su13126789>
- Gusenbauer, M., & Haddaway, N. R. (2020). Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta-analyses? *Research Synthesis Methods*, 11(2), 181–217. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1378>
- Hasan, M. (2023). Tata ruang dan konektivitas ekonomi wilayah perbatasan darat Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 11(1), 45–62. <https://doi.org/10.14710/jwl.11.1.45-62>
- Houtum, H. V., & Bueno Lacy, R. (2020). The political geography of sovereignty: Geopolitics of border enforcement. *Political Geography*, 82, 102–121. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102121>
- Jesson, J., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). *Doing your systematic review: To accompany your research*. Sage Publications.

- Johnson, C., Jones, R., Paasi, A., Amoore, L., Mountz, A., Salter, M., & Rumford, C. (2016). Intersections of border studies: Integrating multidisciplinary frameworks. *Political Geography*, 50, 45–58. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2015.06.002>
- Jones, T. (2021). From periphery to showcase: The prosperity approach in borderland development. *Political Geography*, 89, 102–115. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102390>
- Konrad, V. (2019). Sustainability principles in transboundary environmental conservation areas. *Journal of Borderlands Studies*, 34(5), 701–720. <https://doi.org/10.1080/08865655.2017.1399815>
- Kramsch, O. T. (2023). The border paradox: Balancing soft integration and hard security in contemporary border management. *Geopolitics*, 28(1), 88–107. <https://doi.org/10.1080/14650045.2021.1984210>
- Kurowska-Pysz, J. (2021). Multi-level governance in cross-border cooperation: Models and institutional frameworks. *Sustainability*, 13(5), 2411–2428. <https://doi.org/10.3390/su13052411>
- Laine, J. P. (2020). Reframing the border as a space of interaction: Beyond the militaristic approach. *Geopolitics*, 25(3), 645–662. <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1393162>
- Little, O. (2022). Biosecurity crisis management and transnational disease tracking mechanisms. *Sustainability*, 14(2), 901–918. <https://doi.org/10.3390/su14020901>
- Longo, M. (2018). Smart borders and database integration: Security versus mobility. *Journal of Borderlands Studies*, 33(2), 205–221. <https://doi.org/10.1080/08865655.2016.1195604>
- Martinez, O. (2017). Informal cross-border commerce and subsistence economies in borderlands. *Journal of Borderlands Studies*, 32(3), 311–329. <https://doi.org/10.1080/08865655.2016.1145601>
- McConnell, F. (2021). Sovereignty diplomacy and the cartographic resolution of boundary disputes. *Political Geography*, 85, 102–118. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102311>
- Medeiros, E. (2019). Spatial planning and territorial cohesion indicators in border regions. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 7(2), 95–110. <https://doi.org/10.14710/jwl.7.2.95-110>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., ... & PRISMA-P Group. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic Reviews*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>
- Newman, D. (2021). Contemporary border governance and the prosperity approach: Reorienting territorial edges. *Political Geography*, 86, 45–59. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102322>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372(n71), 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pallister-Wilkins, P. (2016). Humanitarian border policing and the protection of migrants. *Geopolitics*, 21(3), 543–562. <https://doi.org/10.1080/14650045.2015.1118221>
- Perkmann, M. (2017). The institutionalization of cross-border growth zones: Special economic regions. *Journal of Borderlands Studies*, 32(4), 489–505. <https://doi.org/10.1080/08865655.2016.1174603>
- Popescu, G. (2021). Decentralization and autonomous border governance: Mapping the institutional architectures. *Journal of Borderlands Studies*, 36(4), 511–529. <https://doi.org/10.1080/08865655.2019.1601232>
- Pratama, R. (2024). Evaluasi rencana aksi kinerja kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 34–48. <https://doi.org/10.31258/jkp.12.1.34-48>
- Ramadhan, A., & Setiawan, B. (2022). Pembangunan kawasan permukiman inklusif di perbatasan darat Kalimantan. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 10(2), 134–149. <https://doi.org/10.14710/jwl.10.2.134-149>

- Rumford, C. (2018). Cosmopolitan borders and local citizen participation in border management. *Geopolitics*, 23(1), 122–139. <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1328812>
- Salter, M. B. (2019). Biometrics at the passport control: The performance of borders. *Political Geography*, 70, 56–68. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.01.003>
- Sassen, S. (2020). Transnational capital flows and spatial control in border zones. *Journal of Borderlands Studies*, 35(4), 511–528. <https://doi.org/10.1080/08865655.2018.1423604>
- Scott, J. W. (2020). Border management, regional growth, and spatial planning in developing borderlands. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(2), 112–128. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.2.112-128>
- Simmons, A., & Dijk, H. (2022). Cross-border trade and economic integration in the Global South: A paradoxical management. *Journal of Borderlands Studies*, 39(1), 45–63. <https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1901233>
- Smith, M., & Harrison, J. (2023). Sustainable development goals (SDGs) in remote borderlands: Ecology, infrastructure, and social capital. *Sustainability*, 15(4), 3102–3119. <https://doi.org/10.3390/su15043102>
- Sohn, C. (2018). Cross-border metropolitan regions as hubs of regional integration. *Political Geography*, 64, 23–35. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.11.004>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Squire, V. (2017). Governing migration through physical violence: A critique of territorial border enforcement. *Geopolitics*, 22(2), 284–305. <https://doi.org/10.1080/14650045.2016.1211122>
- Sudirman, L. (2025). Sinergi lembaga pengawasan dalam memitigasi jaringan penyelundupan komoditas. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 77–91. <https://doi.org/10.31258/jkp.13.1.77-91>
- Syarifuddin, A. (2023). Transformasi tata ruang dan pembangunan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN). *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 101–114. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.101-114>
- Topak, Ö. E. (2019). The biopolitics of digital border surveillance: Tracking human mobility. *Geopolitics*, 24(4), 812–835. <https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1441113>
- Vaughan-Williams, N. (2021). Analyzing security threat perceptions at the ground level of borderlands. *Political Geography*, 88, 102–120. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102381>
- Walle, S. V. (2020). Infrastructure deficit and spatial isolation in remote border regions. *Sustainability*, 12(15), 6120–6135. <https://doi.org/10.3390/su12156120>
- Walters, W. (2016). Transport infrastructure, checkpoints, and the logistics of legal border crossing. *Journal of Borderlands Studies*, 31(3), 325–342. <https://doi.org/10.1080/08865655.2015.1064603>
- Whiting, P., Savović, J., Higgins, J. P., Caldwell, D. M., Reeves, B. C., Shea, B., ... & ROBIS Group. (2016). ROBIS: A new tool to assess risk of bias in systematic reviews was developed. *Journal of Clinical Epidemiology*, 69, 225–234. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.07.009>
- Widjaja, K. (2022). Pemberdayaan modal sosial dalam perlindungan kawasan konservasi alam perbatasan. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 10(3), 201–215. <https://doi.org/10.14710/jwl.10.3.201-215>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723394>
- Zaiotti, I. (2023). Digitalizing contemporary border security governance: High-tech management and its implications. *Geopolitics*, 28(2), 145–163. <https://doi.org/10.1080/14650045.2021.2001134>